



Model Evaluasi Dalam Implementasi Kebijakan Car Free Night Untuk Penguatan Kapasitas Pariwisata di Kota Palembang

Evaluation Model in the Implementation of the Car Free Night Policy to Strengthen Tourism Capacity in Palembang City

K.M. Isnaini Madani, Sriati, Abdul Nadjib, & Alfitri

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sriwijaya, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kebijakan Car Free Night di Sekanak Lambidaro sebagai upaya penguatan kapasitas pariwisata Kota Palembang, serta merumuskan model evaluasi kebijakan berbasis collaborative governance. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumen, dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Car Free Night berpotensi menjadi ikon wisata malam unggulan karena mampu menarik minat pengunjung, meningkatkan omzet UMKM, dan memperkuat citra destinasi. Namun, keberlanjutannya masih terkendala oleh regulasi operasional yang belum jelas, keterbatasan anggaran, infrastruktur pendukung, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Model evaluasi yang diusulkan mengintegrasikan indikator kuantitatif dan kualitatif, pembagian peran dalam pengumpulan data, serta pelaporan hasil evaluasi secara transparan. Pendekatan collaborative governance diyakini mampu memperkuat partisipasi seluruh pemangku kepentingan, meningkatkan efektivitas kebijakan, dan mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di Kota Palembang.

Kata kunci: Car Free Night; Evaluasi Kebijakan; Collaborative Governance; Kapasitas Pariwisata; Palembang.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Car Free Night policy in Sekanak Lambidaro as an effort to strengthen the tourism capacity of Palembang City, as well as formulate a policy evaluation model based on collaborative governance. The research method uses a qualitative approach with a case study design. Data were obtained through in-depth interviews, participatory observations, and document review, with informants selected using purposive sampling techniques. The results of the study show that Car Free Night has the potential to become a leading night tourism icon because it is able to attract visitors, increase MSME turnover, and strengthen the image of the destination. However, its sustainability is still constrained by unclear operational regulations, budget limitations, supporting infrastructure, and suboptimal cross-sector coordination. The proposed evaluation model integrates quantitative and qualitative indicators, division of roles in data collection, and transparent reporting of evaluation results. The collaborative governance approach is believed to be able to strengthen the participation of all stakeholders, increase policy effectiveness, and support sustainable tourism development in the city of Palembang.

Keywords: Car Free Night; Policy Evaluation; Collaborative Governance; Tourism Capacity; Palembang.

How to Cite: Madani, K. M. I., Sriati, Nadjib, A., & Alfitri. (2025). Model Evaluasi Dalam Implementasi Kebijakan Car Free Night Untuk Penguatan Kapasitas Pariwisata di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP)*, 4(2): 61-68

*E-mail: madaniisnaini@gmail.com

ISSN 2828-6537 (Online)



PENDAHULUAN

Pariwisata telah menjadi salah satu sektor strategis dalam pembangunan daerah dan nasional (Ismayanti, 2010; Pendit, 1999). Di Indonesia, setiap wilayah memiliki karakteristik dan potensi unik, baik yang terbentuk secara alami maupun hasil inovasi Pembangunan (Pitana, 2005; Ridwan & Hadyanto, 2012; Utama, 2014). Potensi tersebut mencakup keindahan alam, kekayaan budaya, serta kreativitas masyarakat dalam menciptakan daya tarik wisata baru. Sektor pariwisata tidak hanya berperan sebagai sumber hiburan dan rekreasi, tetapi juga sebagai penggerak perekonomian, penyerap tenaga kerja, serta sarana diplomasi budaya yang efektif (Putri, 2022; Wardiyanto & Baiquni, 2011).

Kota Palembang, ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, adalah salah satu daerah dengan kekayaan sejarah, budaya, dan ikon wisata yang telah dikenal luas, seperti Jembatan Ampera dan Sungai Musi. Pemerintah daerah telah mengeluarkan regulasi khusus, seperti Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, yang mengatur berbagai bidang usaha pariwisata, mulai dari daya tarik wisata, jasa perjalanan, transportasi, hingga penyelenggaraan kegiatan hiburan (Nugraha, 2019; Priyanti et al., 2018). Regulasi ini menjadi kerangka kebijakan yang mendukung pengembangan sektor pariwisata secara terarah dan berkelanjutan.

Dalam konteks globalisasi dan persaingan destinasi wisata antar daerah, pemerintah daerah dituntut mampu berinovasi, menyelenggarakan kegiatan kreatif, dan meningkatkan fasilitas agar mampu menarik wisatawan nusantara maupun mancanegara (Alfonsius & Djou, 2013; Ariansyah et al., 2025; Maharani, 2019). Event berbasis budaya, olahraga, dan ekonomi kreatif menjadi instrumen penting untuk menciptakan pengalaman unik bagi wisatawan (Luh & Agustini, 2014; Silalahi, 2019). Di Palembang, salah satu inovasi tersebut adalah penyelenggaraan program Car Free Night yang menggabungkan rekreasi, kuliner, seni, dan interaksi sosial dalam satu ruang publik yang bebas kendaraan.

Car Free Night di kawasan Sekanak Lambidaro merupakan salah satu program pariwisata unggulan yang pernah digagas Pemerintah Kota Palembang. Program ini menampilkan wajah baru destinasi wisata malam di tepian Sungai Sekanak, lengkap dengan fasilitas pendukung dan estetika kota yang telah dibangun. Pelaksanaan perdana pada 22 September 2022 mendapat sambutan positif, ditandai dengan tingginya jumlah pengunjung dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM kuliner dan kerajinan.

Namun, program ini belum berkelanjutan dan terhenti setelah periode pelaksanaan awal. Kondisi ini mengulang pola yang sebelumnya terjadi pada *Car Free Night* di kawasan Pedestrian Sudirman, yang juga berhenti akibat berbagai kendala, seperti keterbatasan lahan, parkir, pengaturan kerumunan, serta belum optimalnya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Ketiadaan regulasi operasional yang kuat dan model tata kelola yang jelas turut memperlemah keberlangsungan program.

Padahal, data menunjukkan bahwa sektor pariwisata Kota Palembang memiliki potensi besar. Pada 2022, jumlah kunjungan wisatawan mencapai lebih dari 1,5 juta orang, mayoritas wisatawan nusantara, dengan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak hotel, restoran, dan hiburan. Jika program *Car Free Night* dikelola secara kolaboratif, inovatif, dan berkelanjutan, bukan hanya kunjungan wisata yang meningkat, tetapi juga kapasitas pariwisata kota dalam menciptakan pengalaman wisata yang khas dan berdaya saing.

Permasalahan ini memunculkan pertanyaan strategis: bagaimana merancang model implementasi dan evaluasi kebijakan yang dapat memastikan keberlanjutan program *Car Free Night* sebagai destinasi unggulan? Pendekatan collaborative governance diyakini dapat menjadi

solusi, karena melibatkan pemerintah, swasta, komunitas, dan masyarakat dalam satu mekanisme kerja sama yang jelas, saling menguntungkan, dan akuntabel.

Sejumlah penelitian telah membahas penerapan collaborative governance dalam berbagai sektor, termasuk pariwisata. Abdulmawla et al. (2024) dalam studi berjudul *Fetching the 'exterior' 'in': Effects of an alliance's collaborative governance and collaborative accountability on hotel innovation performance* menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta di sektor perhotelan mampu meningkatkan inovasi layanan dan daya saing destinasi. Temuan ini menegaskan pentingnya koordinasi lintas aktor untuk menciptakan nilai tambah dalam industri pariwisata.

Zhao et al. (2024) dalam penelitian *Determinants and action paths of transboundary water pollution collaborative governance: A case study of the Yangtze River Basin, China* memaparkan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif ditentukan oleh kejelasan peran, komunikasi yang efektif, dan mekanisme evaluasi yang terukur. Meskipun fokus penelitian pada pengelolaan lingkungan, prinsip-prinsipnya relevan untuk implementasi kebijakan pariwisata yang melibatkan banyak pihak.

Shen et al. (2024) melalui studi *Critical success factors and collaborative governance mechanism for the transformation of existing residential buildings in urban renewal: From a social network perspective* menegaskan bahwa collaborative governance membutuhkan pemetaan jaringan sosial dan aktor untuk mengoptimalkan peran masing-masing pihak. Pendekatan ini dapat diadaptasi dalam konteks revitalisasi kawasan wisata seperti Sekanak Lambidaro, yang memerlukan sinergi antara pemerintah, komunitas lokal, dan sektor usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan model evaluasi kebijakan Car Free Night di Sekanak Lambidaro Kota Palembang melalui pendekatan collaborative governance, sehingga dapat menjadi acuan dalam penguatan kapasitas pariwisata daerah. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian administrasi publik dan manajemen pariwisata, khususnya dalam mengintegrasikan prinsip New Public Management dan Good Governance dalam konteks tata kelola kolaboratif. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Kota Palembang dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang program wisata berkelanjutan yang inklusif, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Dengan demikian, Car Free Night tidak hanya menjadi agenda temporer, tetapi dapat berkembang menjadi ikon wisata malam yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat citra Kota Palembang di tingkat nasional maupun internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang berfokus pada implementasi kebijakan *Car Free Night* untuk penguatan kapasitas pariwisata di Kota Palembang. Subjek penelitian meliputi pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, antara lain pejabat Dinas Pariwisata Kota Palembang, pelaku UMKM, komunitas lokal, aparat keamanan, dan pengunjung. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan relevansi dan keterlibatan mereka dalam program. Jumlah informan disesuaikan dengan kebutuhan sampai mencapai titik jenuh data (data saturation).

Bahan penelitian berupa dokumen kebijakan, laporan kegiatan, data statistik kunjungan wisatawan, serta dokumentasi visual kawasan Sekanak Lambidaro. Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri (human instrument) yang dilengkapi pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, serta alat perekam suara dan kamera untuk mendokumentasikan

temuan lapangan. Observasi dilakukan secara partisipatif untuk menangkap dinamika kegiatan Car Free Night secara langsung.

Variabel yang diamati mencakup pelaksanaan kebijakan, faktor pendukung dan penghambat, serta indikator penguatan kapasitas pariwisata seperti peningkatan kunjungan, partisipasi pelaku usaha, dan persepsi pengunjung. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen.

Data dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola, hubungan antarvariabel, dan temuan kunci yang relevan dengan tujuan penelitian. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu, serta member check kepada informan untuk memvalidasi hasil interpretasi. Model analisis yang digunakan mengacu pada kerangka collaborative governance, dipadukan dengan prinsip New Public Management dan Good Governance untuk merumuskan rekomendasi model evaluasi kebijakan yang aplikatif bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kota Palembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pelaksanaan Kebijakan Car Free Night dan Faktor Pendukung serta Penghambatnya

Pelaksanaan kebijakan Car Free Night di kawasan Sekanak Lambidaro Kota Palembang merupakan salah satu upaya strategis Pemerintah Kota untuk meningkatkan kapasitas pariwisata daerah. Program ini dirancang sebagai ruang publik terbuka tanpa kendaraan bermotor pada malam hari, yang menghadirkan kombinasi atraksi wisata, hiburan, kuliner, dan ruang interaksi sosial masyarakat. Konsep ini tidak hanya bertujuan untuk memperkenalkan keindahan kawasan tepian Sungai Sekanak, tetapi juga sebagai langkah revitalisasi ruang kota dengan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Secara umum, pelaksanaan kebijakan ini melibatkan beberapa tahap utama, yaitu perencanaan, koordinasi antar pemangku kepentingan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, Dinas Pariwisata Kota Palembang bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi perangkat daerah lain, aparat keamanan, komunitas lokal, dan pelaku usaha. Perencanaan mencakup penentuan jadwal pelaksanaan, penataan kawasan, pengaturan arus lalu lintas, penyediaan fasilitas pendukung, serta strategi promosi. Salah satu kekuatan pada tahap ini adalah adanya integrasi program dengan agenda besar "Calendar of Charming Events" Kota Palembang, sehingga Car Free Night tidak berdiri sendiri melainkan menjadi bagian dari strategi promosi wisata tahunan.

Tahap koordinasi menjadi krusial mengingat Car Free Night melibatkan multi-aktor. Pemerintah daerah memegang peran sebagai fasilitator dan regulator, sektor swasta mendukung melalui sponsorship atau penyediaan layanan, sementara komunitas dan masyarakat menjadi pelaku sekaligus penerima manfaat. Model koordinasi yang digunakan cenderung bersifat top-down, di mana pemerintah menjadi pengarah utama. Namun, terdapat potensi penguatan melalui pola collaborative governance yang memungkinkan setiap pihak memiliki peran setara dalam pengambilan keputusan.

Pelaksanaan kegiatan Car Free Night diawali dengan pembukaan resmi pada 22 September 2022, yang ditandai dengan beragam atraksi seni, musik, dan pameran kuliner. Kawasan Sekanak Lambidaro ditata dengan pencahayaan artistik, fasilitas tempat duduk, jalur pedestrian yang lebar, serta ruang untuk stan UMKM. Masyarakat dapat menikmati hiburan sambil berinteraksi dengan pedagang dan komunitas lokal. Data Dinas Pariwisata menunjukkan bahwa kegiatan perdana ini menarik ribuan pengunjung, yang sebagian besar merupakan wisatawan lokal dan domestik.

Dampak langsung yang terlihat adalah meningkatnya penjualan UMKM, meningkatnya okupansi hotel di sekitar lokasi, dan liputan positif di media lokal.

Meskipun demikian, keberlanjutan program menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu hambatan utama adalah ketiadaan regulasi operasional yang mengatur penyelenggaraan Car Free Night secara rinci, termasuk mekanisme pembiayaan, pembagian peran antar pihak, dan standar layanan. Hal ini menyebabkan kegiatan berhenti setelah periode awal pelaksanaan. Tantangan lain adalah keterbatasan anggaran promosi dan pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun. Tanpa promosi berkelanjutan, daya tarik program berpotensi menurun, apalagi dalam konteks persaingan destinasi wisata yang semakin ketat.

Dari perspektif manajemen acara, pengaturan arus pengunjung dan ketersediaan lahan parkir menjadi masalah yang belum terpecahkan sepenuhnya. Lokasi Sekanak Lambidaro memiliki keterbatasan ruang untuk parkir kendaraan, sehingga sering terjadi kemacetan di akses masuk. Pengaturan keamanan dan kebersihan juga menjadi perhatian, mengingat tingginya volume pengunjung pada jam-jam tertentu.

Selain hambatan teknis, terdapat pula tantangan koordinasi antar stakeholder. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian pelaku UMKM merasa belum dilibatkan secara optimal dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga inisiatif yang muncul cenderung berasal dari pemerintah. Kondisi ini mengurangi rasa kepemilikan (*sense of ownership*) dari pihak non-pemerintah, yang seharusnya menjadi kekuatan utama dalam model kolaboratif.

Di sisi lain, pelaksanaan Car Free Night juga mendapat dukungan dari sejumlah faktor pendukung. Pertama, lokasi Sekanak Lambidaro yang strategis dan memiliki nilai sejarah serta estetika menjadi modal penting. Revitalisasi kawasan sungai telah memberikan citra baru yang menarik untuk dikunjungi, baik siang maupun malam hari. Kedua, antusiasme masyarakat terhadap kegiatan berbasis ruang publik terbuka cukup tinggi, apalagi setelah masa pembatasan sosial akibat pandemi COVID-19. Kegiatan ini menjadi ajang rekreasi keluarga dan komunitas yang terjangkau.

Faktor pendukung berikutnya adalah sinergi lintas sektor, meskipun belum maksimal. Keterlibatan media lokal dan nasional dalam meliput kegiatan telah membantu meningkatkan eksposur publik. Dukungan dari komunitas seni, pelaku kuliner, dan industri kreatif juga memperkaya konten acara. Potensi sponsorship dari pihak swasta menjadi peluang yang dapat dioptimalkan untuk mengurangi beban pembiayaan dari APBD.

Jika dilihat dari perspektif kebijakan publik, Car Free Night memiliki nilai strategis sebagai bentuk inovasi pelayanan publik di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Kebijakan ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk menjadikan Palembang sebagai destinasi wisata yang kompetitif, dengan mengandalkan keunikan budaya lokal dan kreativitas masyarakat. Namun, keberhasilan kebijakan semacam ini memerlukan dukungan kebijakan turunan yang mengatur aspek teknis dan memastikan kolaborasi berkelanjutan antar pemangku kepentingan.

Dalam kerangka evaluasi kebijakan, implementasi Car Free Night dapat diukur melalui indikator output (jumlah kegiatan, jumlah pengunjung, jumlah pelaku usaha terlibat), outcome (peningkatan pendapatan UMKM, peningkatan tingkat kunjungan wisatawan), dan impact (perubahan citra destinasi, peningkatan PAD sektor pariwisata). Data awal menunjukkan capaian positif pada indikator output, namun belum terdapat pengukuran komprehensif terhadap outcome dan impact.

Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan Car Free Night di Sekanak Lambidaro memiliki fondasi yang kuat dari segi konsep dan penerimaan masyarakat. Akan tetapi, keberlanjutannya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan stakeholder lain untuk mengatasi hambatan yang ada, menyusun regulasi pendukung, mengamankan sumber pembiayaan, serta memperkuat

koordinasi dan partisipasi semua pihak. Integrasi prinsip collaborative governance menjadi kunci untuk menciptakan tata kelola yang inklusif, transparan, dan akuntabel, sehingga program dapat berkembang menjadi ikon wisata malam yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Perumusan Model Evaluasi Kebijakan melalui Pendekatan Collaborative Governance untuk Penguatan Kapasitas Pariwisata

Kebutuhan akan model evaluasi kebijakan yang efektif menjadi urgensi dalam konteks pengembangan Car Free Night di Sekanak Lambidaro Kota Palembang. Evaluasi tidak hanya dimaknai sebagai proses menilai keberhasilan atau kegagalan program, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk melakukan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan. Dalam kerangka penguatan kapasitas pariwisata, evaluasi berfungsi untuk mengidentifikasi potensi, hambatan, dan peluang perbaikan pada setiap tahap implementasi. Pendekatan collaborative governance dipilih karena mampu mengintegrasikan perspektif multi-aktor pemerintah, sektor swasta, komunitas, dan masyarakat ke dalam satu mekanisme pengelolaan dan evaluasi bersama.

Secara konseptual, collaborative governance mengedepankan prinsip kolaborasi yang setara antara aktor publik dan non-publik dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Model ini relevan diterapkan pada program Car Free Night, yang secara alamiah melibatkan beragam pihak mulai dari Dinas Pariwisata, pelaku UMKM, komunitas seni dan budaya, aparat keamanan, media, hingga pengunjung sebagai penerima manfaat langsung. Evaluasi kebijakan dalam kerangka ini menuntut keterlibatan aktif semua pihak sejak awal perencanaan hingga penyusunan rekomendasi perbaikan.

Tahap awal perumusan model evaluasi dimulai dengan mengidentifikasi aktor dan kepentingan masing-masing. Pemerintah daerah bertindak sebagai koordinator utama, namun dalam collaborative governance, pengambilan keputusan harus dilakukan secara partisipatif melalui forum bersama atau multi-stakeholder meeting. Forum ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi mengenai tujuan program, indikator keberhasilan, dan metode pengumpulan data evaluasi. Misalnya, indikator kuantitatif seperti jumlah pengunjung, omzet UMKM, dan tingkat okupansi hotel perlu dipadukan dengan indikator kualitatif seperti tingkat kepuasan pengunjung, kualitas atraksi, dan citra destinasi.

Tahap berikutnya adalah penentuan instrumen dan metode evaluasi. Mengacu pada teori evaluasi kebijakan, model ini dapat menggabungkan metode formative evaluation (penilaian selama program berlangsung) dan summative evaluation (penilaian pada akhir program). Pendekatan ini memungkinkan perbaikan cepat (real-time improvement) sekaligus memberikan gambaran menyeluruh setelah program selesai. Teknik pengumpulan data dapat mencakup survei pengunjung, wawancara mendalam dengan pelaku usaha dan pengelola, observasi langsung, serta analisis dokumen dan data sekunder dari instansi terkait.

Dalam collaborative governance, distribusi peran menjadi aspek krusial. Pemerintah daerah tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang mengumpulkan dan mengolah data evaluasi (Kurniadi & Suryadi, 2021; Rahmayanti, 2020). Komunitas dan pelaku usaha dapat dilibatkan dalam melakukan survei atau pengumpulan masukan dari pengunjung. Media lokal dapat berperan dalam menyebarkan informasi hasil evaluasi, sementara pihak akademisi dapat memberikan analisis objektif berdasarkan data yang terkumpul. Pembagian peran ini tidak hanya memperluas cakupan evaluasi, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan terhadap program (Emerson, 2015; Wisnumurti & Larantika, 2021).

Selain itu, model evaluasi yang diusulkan mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Semua data, metode, dan hasil evaluasi harus dapat diakses oleh pemangku kepentingan terkait, bahkan oleh publik secara luas. Transparansi ini penting untuk membangun

kepercayaan dan memotivasi partisipasi masyarakat. Akuntabilitas diwujudkan melalui laporan evaluasi yang memuat capaian, kendala, dan rekomendasi yang jelas, yang kemudian menjadi dasar perbaikan program pada periode selanjutnya.

Dalam konteks penguatan kapasitas pariwisata, hasil evaluasi diharapkan tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga memberikan masukan strategis. Misalnya, jika data menunjukkan rendahnya jumlah wisatawan mancanegara, evaluasi harus mampu mengidentifikasi penyebabnya apakah karena promosi yang kurang efektif, akses transportasi yang terbatas, atau keterbatasan fasilitas berstandar internasional dan menawarkan solusi yang realistis. Dengan demikian, evaluasi berfungsi sebagai jembatan antara temuan lapangan dan kebijakan strategis.

Penggunaan kerangka collaborative governance juga memungkinkan integrasi evaluasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang. Misalnya, rekomendasi dari evaluasi Car Free Night dapat diintegrasikan ke dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Palembang, sehingga keberlanjutan program terjamin secara formal. Hal ini penting untuk menghindari pola event-based tourism yang hanya bersifat temporer dan tidak memberikan dampak jangka panjang bagi ekonomi dan citra destinasi.

Model evaluasi yang dirumuskan dalam penelitian ini terdiri dari empat komponen utama: (1) Stakeholder Engagement, memastikan keterlibatan aktif semua pihak; (2) Integrated Indicators, memadukan indikator kuantitatif dan kualitatif; (3) Shared Responsibility, pembagian peran dalam pengumpulan dan analisis data; dan (4) Transparent Reporting, publikasi hasil evaluasi secara terbuka. Keempat komponen ini saling melengkapi untuk menciptakan evaluasi kebijakan yang inklusif, kredibel, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Penerapan model ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas pariwisata Kota Palembang melalui beberapa cara. Pertama, memperbaiki kualitas penyelenggaraan Car Free Night dari sisi manajemen, konten acara, dan layanan publik. Kedua, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pengunjung yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan dan lama tinggal (length of stay). Ketiga, menciptakan sinergi antar pelaku wisata yang dapat melahirkan inovasi produk dan layanan baru. Keempat, memperkuat citra Kota Palembang sebagai destinasi wisata yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, perumusan model evaluasi kebijakan berbasis collaborative governance bukan hanya merupakan respons terhadap kebutuhan teknis evaluasi program Car Free Night, tetapi juga merupakan strategi pembangunan pariwisata yang berorientasi jangka panjang. Melalui partisipasi aktif semua pihak, transparansi, dan akuntabilitas, model ini diharapkan dapat menjadi contoh praktik terbaik (best practice) bagi daerah lain yang ingin mengembangkan program wisata berbasis ruang publik dengan dukungan multi-aktor.

SIMPULAN

Pelaksanaan kebijakan Car Free Night di Sekanak Lambidaro menunjukkan bahwa program ini memiliki potensi besar dalam memperkuat kapasitas pariwisata Kota Palembang melalui penyediaan ruang publik yang kreatif, inklusif, dan berdaya tarik tinggi. Keberhasilan awal pelaksanaan terlihat dari tingginya antusiasme masyarakat, peningkatan omzet UMKM, serta liputan media yang positif. Namun, keberlanjutan program masih terkendala oleh ketiadaan regulasi operasional yang jelas, keterbatasan anggaran, pengaturan infrastruktur, dan koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Faktor pendukung seperti lokasi yang strategis, nilai sejarah kawasan, dan potensi kolaborasi antar pelaku wisata perlu dikelola secara terarah agar manfaat program dapat dimaksimalkan.

Perumusan model evaluasi kebijakan berbasis collaborative governance menjadi solusi strategis untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas Car Free Night. Model ini

menekankan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan, integrasi indikator kuantitatif dan kualitatif, pembagian tanggung jawab evaluasi, serta pelaporan yang transparan. Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan evaluasi yang komprehensif, tetapi juga mendorong rasa kepemilikan bersama terhadap program, sehingga menciptakan komitmen jangka panjang. Dengan penerapan model ini, Car Free Night berpotensi berkembang menjadi ikon wisata malam unggulan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan citra destinasi, dan pencapaian visi pembangunan pariwisata Kota Palembang yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Abdulmawla, M., Imperiale, F., & Fasiello, R. (2024). Fetching the 'exterior' in: Effects of an alliance's collaborative governance and collaborative accountability on hotel innovation performance. *International Journal of Hospitality Management*, 122, 103848.
- Alfonsius, J., & Djou, G. (2013). Pengembangan 24 Destinasi Wisata Bahari Kabupaten Ende. *Jurnal Kawistara*, 3(1).
- Ariansyah, H., Putri, N. A., & Malik, F. (2025). Review Online Sebagai Alat Promosi Destinasi Wisata. *Jurnal Pemasaran Digital*, 8(1), 45–58.
- Emerson, K. (2015). *Collaborative Governance Regimes*. Georgetown University Press.
- Ismayanti, I. (2010). Pengantar pariwisata. *PT Gramedia Widisarana*.
- Kurniadi, & Suryadi, S. (2021). *Collaborative-Governance: Teori dan Implementasi* (p. 266).
- Luh, N., & Agustini, P. (2014). Strategi Komunikasi Pemasaran Ekowisata Pada Destinasi Wisata Dolphin Hunting Lovina. *Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 8(1), 45–51. <https://doi.org/10.24843/MATRIK:JMBK>
- Maharani, D. (2019). *Motivasi Wisatawan dalam Mengunjungi Destinasi Wisata Budaya*. Penerbit ITB.
- Nugraha, A. (2019). *Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal*. Universitas Negeri Medan Press.
- Pendit, N. S. (1999). *Ilmu Pariwisata-Sebuah Pengantar Perdana*. Pradnya Paramita.
- Pitana, I. G. dan P. G. G. (2005). *Sosiologi Pariwisata*. Andi Offset.
- Priyanti, E., Istiningdias, D. S., & others. (2018). Manajemen Pemerintahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang dalam Mengembangkan Pariwisata di Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(2), 202–214.
- Putri, D. (2022). Green Tourism Sebagai Kunci Pariwisata Berkelanjutan. *Pariwisata Nusantara*, 49.
- Rahmayanti, K. P. (2020). Promote collaborative governance? Review of disaster risk reduction strategy in Jakarta. In *Promote collaborative governance? Review of disaster risk reduction strategy in Jakarta*. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.
- Ridwan, M., & Hadyanto, S. (2012). *Perencanaan pengembangan pariwisata*. Sofmedia.
- Shen, L., Tang, L., & Mu, Y. (2024). Critical success factors and collaborative governance mechanism for the transformation of existing residential buildings in urban renewal: From a social network perspective. *Heliyon*, 10(6).
- Silalahi, P. H. (2019). *Sistem Kekerabatan dalam Pengembangan Situs Desa Siallagan Sebagai Destinasi Wisata*. Universitas Sumatera Utara.
- Utama, I. G. B. R. (2014). Pengantar Industri Pariwisata. In *Deepublish Yogyakarta*.
- Wardiyanto & Baiquni, M. (2011). Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. *Bandung: Lubuk Agung*.
- Wisnumurti, A. A. G. O., & Larantika, A. A. A. D. (2021). Collaborative Governance: Model Pengembangan Ekowisata di Desa Siangan. In *Postgraduated Community Service Journal* (Vol. 2, Issue 1, pp. 10–15). <https://doi.org/10.22225/pcsj.2.1.2021.10-15>
- Zhao, F., Shu, X., Zhao, X., & Guo, M. (2024). Determinants and action paths of transboundary water pollution collaborative governance: A case study of the Yangtze River Basin, China. *Journal of Environmental Management*, 360, 121217.